

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta target Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Renja Tahun 2023 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dan menjadi bahan materi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun semoga dapat membantu pelaksanaan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Padang, Januari 2022

Kepala Dinas

dto

RIFDA SURIANI, ST, Sp
NIP 19680516 199503 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota serta masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan uraian lebih mendetil dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan



perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (performance result) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi/OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan Tahun 2032 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2022 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan adalah : 1) Tahap persiapan kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Perkimtan dimulai sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD Tahun 2012 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Dinas Perkimtan. 2) Tahap kegiatan analisis dan pengkajian dokumen kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RKPD Provinsi Sumatera Barat yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Renstra Dinas Perkimtan yang memuat visi, misi arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintah khususnya pada urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Renja OPD disusun oleh tim penyusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan terkait menjadi dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disesse 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 127);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
 18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
 19. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/SK-Perkimtan/I/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2023 adalah :

1. Mensikronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD tahun 2023.
2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dengan anggaran.
5. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

Kinerja program dan kegiatan dievaluasi terhadap aspek fisik maupun keuangan dengan memperhatikan realisasi fisik maupun keuangannya. Hasil evaluasi rata-rata persentase pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2021 ini adalah Rp 59.410.857.317,32 atau 99,99% untuk fisik sedangkan capaian kinerja keuangan 97,17% dari total anggaran Rp. 61.142.500.731,00. Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.648.108.880,00	7.306.667.153,32	95,54	100,00%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.574.250,00	69.375.400,00	88,29	100,00%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.494.250,00	16.178.150,00	78,94	100,00%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.080.000,00	53.197.250,00	91,59	100,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.172.555.130,00	5.938.829.774,00	96,21	100,00%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.818.626.130,00	5.601.804.174,00	96,27	100,00%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	329.270.000,00	312.410.000,00	94,88	100,00%
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.659.000,00	24.615.600,00	99,82	100,00%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.025.250,00	119.707.900,00	84,29	100,00%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000,00	52.206.000,00	99,44	100,00%
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.069.150,00	24.759.500,00	61,79	100,00%
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.456.100,00	42.742.400,00	86,42	100,00%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.621.030,00	567.305.051,00	90,82	100,00%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.856.000,00	8.799.200,00	99,36	100,00%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.221.680,00	74.298.000,00	82,35	100,00%
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.123.000,00	110.201.100,00	94,90	100,00%
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.011.000,00	41.916.400,00	99,77	100,00%
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.980.000,00	10.970.000,00	99,91	100,00%
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.429.350,00	321.120.351,00	90,09	100,00%



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.574.620,00	31.421.315,00	99,51	100,00%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.297.850,00	245.941.542,32	98,26	100,00%
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000,00	2.700.000,00	47,37	100,00%
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.597.850,00	243.241.542,32	99,45	100,00%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.460.750,00	334.086.171,00	95,87	100,00%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.310.750,00	295.217.671,00	95,44	100,00%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.150.000,00	38.868.500,00	99,28	100,00%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	516.928.116,00	436.862.450,00	84,51	100,00%
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	515.046.210,00	434.980.550,00	84,45	100,00%
2.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	515.046.210,00	434.980.550,00	84,45	100,00%
2.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.881.906,00	1.881.900,00	100,00	100,00%
2.2.2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.881.906,00	1.881.900,00	100,00	100,00%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	259.072.600,00	188.916.955,00	72,92	100,00%
3.1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	259.072.600,00	188.916.955,00	72,92	100,00%
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	259.072.600,00	188.916.955,00	72,92	100,00%
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	52.218.810.433,00	51.150.165.765,00	97,95	
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	52.218.810.433,00	51.150.165.765,00	97,95	99,90%
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.819.097.177,00	2.783.795.995,00	98,75	100,00%
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	49.255.310.226,00	48.258.875.672,00	97,98	99,69%
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	144.403.030,00	107.494.098,00	74,44	100,00%
5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	32.220.625,00	19.170.500,00	59,50	100,00%
5.1	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.220.625,00	19.170.500,00	59,50	100,00%
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	32.220.625,00	19.170.500,00	59,50	100,00%
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	173.924.936,00	81.024.150,00	46,59	100,00%
6.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	173.924.936,00	81.024.150,00	46,59	100,00%
6.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	173.924.936,00	81.024.150,00	46,59	100,00%
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	68.846.974,00	56.990.397,00	82,78	100,00%
7.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.846.974,00	56.990.397,00	82,78	100,00%
7.1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	39.222.700,00	32.674.900,00	83,31	100,00%
7.1.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.624.274,00	24.315.497,00	82,08	100,00%
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	73.260.723,00	51.377.997,00	70,13	100,00%
8.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	73.260.723,00	51.377.997,00	70,13	100,00%
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	73.260.723,00	51.377.997,00	70,13	100,00%
9	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	46.767.100,00	40.243.600,00	86,05	100,00%
9.1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.379.150,00	20.159.100,00	86,23	100,00%
9.1.1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	23.379.150,00	20.159.100,00	86,23	100,00%
9.2	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksium dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.387.950,00	20.084.500,00	85,88	100,00%
9.2.1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.387.950,00	20.084.500,00	85,88	100,00%



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
10.1	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.093.544,00	16.395.000,00	81,59	100,00%
10.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.093.544,00	16.395.000,00	81,59	100,00%
11	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	53.747.000,00	37.145.700,00	69,11	100,00%
11.1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	23.189.600,00	15.822.700,00	68,23	100,00%
11.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.189.600,00	15.822.700,00	68,23	100,00%
11.2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	30.557.400,00	21.323.000,00	69,78	100,00%
11.2.1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	30.557.400,00	21.323.000,00	69,78	100,00%
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	30.719.800,00	25.897.650,00	84,30	100,00%
12.1	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.719.800,00	25.897.650,00	84,30	100,00%
12.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	30.719.800,00	25.897.650,00	84,30	100,00%
JUMLAH		61.142.500.731,00	59.410.857.317,32	97,17	99,99%

Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasarannya dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.615.534.260,00 dan realisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 7.275.245.838,32 atau sebesar 95,52% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.574.250,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 69.375.400,00 atau 88,29% dengan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja daerah.
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.172.555.130,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 5.938.829.774,00 atau 96,21% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.
 - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.025.250,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 119.707.900,00 atau 84,29% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :



- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 624.621.030,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 567.305.051,00 atau 90,82% dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.297.850,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 245.941.542,32 atau 98,26% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.460.750,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 334.086.171,00 atau 95,87% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 2) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.928.116,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 436.862.450,00 atau 84,51% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :



- a) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 515.046.210,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 434.980.550,00 atau 84,45% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.
 - b) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.881.906,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 1.881.900,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- 3) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259.072.600,00 dengan realisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 188.916.955,00 atau 72,92% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 259.072.600,00 atau 72,92% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.218.810.433,00 dengan realisasi sampai desember 2021 sebesar Rp. 51.150.165.765,00 atau 97,95% dan realisasi fisik sebesar 99,90% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.218.810.433,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 51.218.810.433,00 atau 97,95% dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari sub kegiatan berikut :
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman



- Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
- 5) Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.220.625,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 19.170.500,00 atau 59,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.220.625,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 19.170.500,00 atau 59,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi.
- 6) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran Rp. 173.924.936,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 81.024.150,00 atau 46,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.924.936,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 81.024.150,00 atau 46,59% dan realisasi fisik sebesar 100% terlaksananya dengan sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- 7) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan alokasi anggaran Rp. 68.846.974,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 56.990.397,00 atau 82,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.846.974,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.



56.990.387,00 atau 82,78% dan realisasi fisik sebesar 100% dilaksanakan dengan sub kegiatan antara lain adalah :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 73.260.723,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 51.377.997,00 atau 70,13% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 73.260.723,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 51.377.997,00 atau 70,13% dan realisasi fisik sebesar 100% serta pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan yaitu :
- Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran Rp. 46.767.100,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 40.243.600,00 atau 86,05% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 23.379.150,00 terealisasi sampai Desember 2021 adalah Rp. 20.159.100,00 atau 86,23% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dengan sub kegiatan adalah Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
- b) Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah



Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 23.387.950,00 terealisasi sampai Desember 2021 adalah Rp. 20.084.500,00 atau 85,88% dan realisasi fisik 100% dengan sub kegiatan adalah Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 10) Program Penetapan Tanah Ulayat dengan alokasi anggaran Rp. 20.093.544,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 16.395.000,00 atau 81,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 20.093.544,00 terealisasi sampai Desember 2021 adalah Rp. 16.395.000,00 atau 81,59% dan realisasi fisik 100% dengan sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 11) Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan alokasi anggaran Rp. 53.747.000,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 37.145.700,00 atau 69,11% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dengan jumlah anggaran Rp. 23.189.600,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 15.822.700,00 atau 68,23% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dengan rincian sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b) Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong dengan jumlah anggaran Rp. 30.557.400,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 21.323.000,00 atau 69,78% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dengan rincian sub kegiatan adalah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong.
- 12) Program Penatagunaan Tanah dengan alokasi anggaran Rp. 30.719.800,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 25.897.650,00 atau 84,30% dan realisasi fisik 100%. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan jumlah



anggaran Rp. 30.719.800,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 25.897.650,00 atau 84,30% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dengan rincian sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Tahun Berjalan

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 5-(7+9)	11=(10/5)
1.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
	NON URUSAN										
01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase	100	600	100	100	100%	100	400	67%
01.04.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persentase	85	510	12	12	100%	12	486	95%
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja yang disusun	dokumen	4	24	4	4	100%	4	16	67%
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	2	12	2	2	100%	2	8	67%
	04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	2	12	2	2	100%	2	8	67%
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	dokumen	3	18	3	3	100%	3	12	67%
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	dokumen	4	24	4	4	100%	4	16	67%
01.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persentase	100	600	100	100	100%	100	400	67%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang	58	348	58	58	100%	58	232	67%
	02 Penyediaan Adminstrssi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat honor	orang	28	168	7	7	100%	7	154	92%
	03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	laporan	10	60	10	10	100%	10	40	67%
01.04.01.1.03	Administrasi Barang milik daerah pada perrangkat daerah	Tertib administrasi barang milik daerah	bulan	12	72	12	12	100%	12	48	67%
	01 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 5-(7+9)	11=(10/5)
03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	orang	7	42	7	7	100%	7	28	67%
04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bintek yang dilaksanakan	kali	6	36	6	6	100%	6	24	67%
01.04.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase	100	600	100	100	100%	100	400	67%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	buah	166	996	166	166	100%	166	664	67%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	unit	28	168	28	28	100%	28	112	67%
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	43	258	43	43	100%	43	172	67%
04	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan	jenis	12	72	12	12	100%	12	48	67%
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksempler	96	576	96	96	100%	96	384	67%
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%
01.04.01.1.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah	Persentase	100	600	100	100	100%	100	400	67%
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	unit	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Pengadaan mebel	jumlah mebel	unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
01.04.01.1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100	600	100	100	100%	100	400	67%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	200	1200	200	200	100%	200	800	67%
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	11	66	11	11	100%	11	44	67%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 5-(7+9)	11=(10/5)
	02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	55	330	55	55	100%	55	220	67%
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Persentase	20	120	20	20	100%	20	80	67%
01.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase	20	120	20	20	100%	20	80	67%
	01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%
	02 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersedianya data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%
	03 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersedianya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen	1	6	1	1	100%	1	4	67%
01.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase	20	120	20	20	100%	20	80	67%
	01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	orang	50	300	50	50	100%	50	200	67%
	02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	orang	50	300	50	50	100%	50	200	67%
	03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP kepada Pemerintah dan Asosiasi/Badan Usaha/Lembaga terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	orang	50	300	50	50	100%	50	200	67%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Keasasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 5-(7+9)	11=(10/5)
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	Persentase	8	48	8	8	100%	8	32	67%
01.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina	kelompok	6	36	6	6	100%	6	24	67%
02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik	kali	6	36	6	6	100%	6	24	67%
03	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusunnya kebijakan dan legislasi untuk bidang perumahan	dokumen	2	12	2	2	100%	2	8	67%
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terlaksana	kab/kota	19	114	19	19	100%	19	76	67%
01.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (limabelas) Ha	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman	hektar	180	1080	180	180	100%	180	720	67%
01	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen Site Plan dan DED	dokumen	2	12	2	2	100%	2	8	67%
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 5-(7+9)	11=(10/5)	
01.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan Yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase	20	120	20	20	100%	20	80	67%
01.04.04.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Perumahan	Persentase	8,71	52,26	8,71	8,71	100%	8,71	34,84	67%
01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen Perencanaan / DED PSU Perumahan	dokumen	57	342	57	57	100%	57	228	67%
02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Perumahan	Pembangunan dan Peningkatan PSU Perumahan	paket	250	1500	250	250	100%	250	1000	67%
03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU perumahan	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	Persentase	85	510	85	85	100%	85	340	67%
02.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terlaksana	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	Persentase	70	420	70	70	100%	1	349	83%
02.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Kualitas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Garapan	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 5-(7+9)	11=(10/5)
	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang terlaksana	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	Persentase	70	420	70	70	100%	1	349	83%
02.10.06.1.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
	01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
02.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Persentase	80	480	80	80	100%	80	320	67%
02.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%
	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	laporan	1	6	1	1	100%	1	4	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diatas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja.

Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 lokasi	3 lokasi	150%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1 %	1,57 %	157%
4	Meningkatnya Fasilitas Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitas Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	85 %	85 %	100%

Sasaran Pertama adalah Meningkatkan Tata Kelola Organisasi



Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target B untuk tahun 2021. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2021 dengan nilai B atau capaian sebesar 100%. Diharapkan tahun 2022 target nilai B tetap dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

Sasaran Kedua adalah Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perumahan memiliki indikator kinerja Jumlah Kawasan Permukiman yang memiliki PSU yang baik dengan target yang telah ditentukan yaitu 2 (dua) lokasi. Realisasi dari sasaran strategis ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dengan target 2 lokasi pada tahun 2021 dapat dicapai 150% atau melebihi target dengan capaian 3 lokasi. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi adalah 1254,94 hektar. Beberapa kegiatan yang mendukung penanganan kawasan kumuh di dua lokasi yang dilaksanakan tahun 2021 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Sasak Kabupaten Pasaman Barat dengan pekerjaan pembangunan PSU Jalan Lingkung dengan panjang 275 meter.
2. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat dengan pekerjaan pembangunan jalan lingkung dan drainase
3. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Sandi Ulakan Kabupaten Padang Pariaman dengan pekerjaan pembangunan jalan lingkung
4. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Kampung Tarandam Kabupaten Solok Selatan dengan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkung dan Pembangunan MCK
5. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh di Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman berupa pembangunan drainase merupakan lanjutan kegiatan pembangunan kawasan kumuh yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun

2019. Untuk Tahun 2021 pembangunan PSU diselesaikan berupa pekerjaan drainase permukiman.

Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Perumahan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan dengan indikator kinerja mengurangi backlog rumah dengan target 1% penambahan kebutuhan dan ketersediaan rumah dapat dicapai tahun 2021. Tingkat ketersediaan rumah layak dihitung dengan membandingkan jumlah pembangunan rumah yang dilakukan dengan jumlah kebutuhan rumah yang seharusnya dipenuhi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kebutuhan rumah ideal yang harus dipenuhi diperoleh dari data backlog rumah. Backlog rumah adalah indikator untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah dari segi sisi kependudukan dan kepemilikan. Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate/persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Capaian kinerja dari indikator ini terealisasi sebesar 1,57% artinya penyediaan rumah pada tahun 2021 melebihi dari target yang ditetapkan sehingga pemenuhan akan rumah terjadi peningkatan. Pemenuhan Data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat pengurangan backlog pada tahun 2021 dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang dan penyediaan perumahan melalui lembaga keuangan.

Tabel 3.4
Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Tahun 2018, 2019, 2020
dan 2021

Tahun	Backlog Kepemilikan (BPS) (Unit)	Pembangunan Rumah (unit)	Pemenuhan Rumah Layak (persentase)	Target	% Capaian
2018	340.391	3.860	1,13%	3%	38%
2019	343.189	2.473	0,72%	1%	72%
2020	350.060	13.667	3,90%	1%	395%
2021	374.471	5.883	1,57%	1%	157%

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2021 backlog kepemilikan rumah di Provinsi Sumatera Barat adalah 374.471 unit artinya masih ada kekurangan rumah sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan



rumah yang di bangun baik secara perorangan dan pengembang berjumlah 5.883 unit dan pembangunan rumah susun oleh pemerintah pusat dengan jumlah 212 unit. Konsep menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (secure tenure).

Sasaran Keempat adalah Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis meningkatkan perencanaan dan penetapan penggunaan dan indikator kinerja persentase fasilitasi pengadaan dan masalah pertanahan dengan target kinerja 85 %. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi pengadaan dan permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 85% sesuai dengan yang ditargetkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut ;

Isu-Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat

1. Back Log meningkat, dikarenakan Pertumbuhan penduduk , faktor lemahnya ekonomi masyarakat, akibat bencana alam,dll.
2. Kesiediaan Lahan (Land Banking), faktor ketersediaan tanah ini yang menyebabkan tersendatnya perkembangan pembangunan perumahan.
3. Permukiman Kumuh meningkat, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi, dan kurangnya 'Sadar Hidup Bersih'.



4. Banjir di permukiman, dikarenakan sudah padatnya permukiman, daya tampung saluran yang ada sekarang sudah tidak memenuhi kapasitas yang ada, sehingga jika curah hujan tinggi mengakibatkan luapan air.
5. Sulitnya perizinan bagi pengembang, dikarenakan faktor ego sektoral.
6. Sulitnya persyaratan dari pihak Bank, dikarenakan pihak Bank memiliki peraturan yang telah ditetapkan, sehingga meyulitkan masyarakat yang tidak punya slip gaji untuk memiliki rumah.
7. Penataan bangunan dan lingkungan masih belum optimal, dikarenakan kurangnya kepedulian akan penataan lingkungan yang layak. Dalam perencanaan rancangan kawasan perlu dipertimbangkan penataan lingkungan yang layak.
8. Ketersediaan Data Rumah Tidak Layak Huni yang Valid.

Isu-Isu Strategis bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat

1. Isu Strategis Pengembangan Permukiman
 - a. Pengembangan permukiman baru
 - b. Peningkatan kualitas permukiman
 - c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
 - d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan
 - f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal.
2. Isu Strategis Pembangunan Prasarana, Saran Utilitas Umum Kawasan
 - a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum.
 - b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat.

Isu-Isu Strategis bidang Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan pengelolaan Bidang Pertanahan, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah



Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat .

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada.

2. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas). Sepanjang tahun 2010- 2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan.



Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang **Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**, Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.





Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisa
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase Penurunan kawasan Kumuh			Persentase	7,09	14,2	21,3	28,4	28,4	35,4	2,02				
2	Persentase Peningkatan PSU Permukiman			Persentase	8,71	17,3	34,5	51,8	69	86,3					
3	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	SPM		Persentase	100	100	100	100	100	100					
4	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	SPM		standar	100	100	100	100	100	100					
5	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani			Persentase	100	100	100	100	100	100					
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			persentase	B	B	BB	BB	BB	BB	B	B	B	B	
7	Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)			persentase	100	100	100	100	100	100					
8	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)		IKD	Persentase	100	100	100	100	100	100					
9	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)		IKD	Persentase	7,09	14,2	21,3	28,4	28,4	35,4	2,02				
10	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)		IKD	Persentase	20	20	20	20	20	20	0,43				
11	Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)		IKD	Persentase	8,71	17,3	34,5	51,8	69	86,3	18,89				
12	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)		IKD	Persentase	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
13	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)		IKD	Persentase	100	100	100	100	100	100					
14	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota (%)		IKD	Persentase	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
15	Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)		IKD	Persentase	100	100	100	100	100	100					







BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, ditetapkan tujuh prioritas nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2020 – 2024 terkait Bidang Perumahan dan Permukiman

INDIKATOR	Kondisi 2020	Target Akhir 2024
INFRASTRUKTUR DASAR		
Kawasan Kumuh Perkotaan	1,5%	27.000 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah	814 ribu unit	6,46 Juta unit

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategis lintas sektor. (Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2020-2024).

Arah kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of

investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

2. Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi : (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan



- balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelembagaan masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelembagaan masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan system housing career; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan rancangan awal RKPDP Provinsi Sumatera Barat tema pembangunan Tahun 2023 merupakan pertengahan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah peningkatan ekonomi pada tiga sektor yakni pertanian, UMKM dan pariwisata serta pemulihan akibat dampak dari pandemic Covid-19 sekaligus mendukung pencapaian tema RKP. Prioritas pembangunan Tahun 2023 untuk mewujudkan Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adukk Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan



4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 2 urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan sehingga mendukung misi ke-6 melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan permukiman.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan dinas tujuan kerja tahun 2021 berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 lokasi	3 lokasi	150%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1 %	1,57 %	157%
4	Meningkatnya Fasilitas Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitas Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	85 %	85 %	100%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					27.575.847.644,00				41.603.861.950,00
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.949.856.994,00				24.050.711.550,00
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	10.958.900.000,00	PAD		100%	10.958.900.000,00
1.04.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Persentase Sinkronisasi perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Indikator Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat		85%	374.500.000,00	PAD		85%	374.500.000,00
				17 Dokumen				17 Dokumen	
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	4 Dokumen	138.000.000,00	PAD		4 Dokumen	138.000.000,00
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	59.000.000,00	PAD		1 Dokumen	59.000.000,00
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	2 Dokumen	35.000.000,00	PAD		2 Dokumen	35.000.000,00
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3.500.000,00	PAD		1 Dokumen	3.500.000,00
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	2 Dokumen	6.000.000,00	PAD		2 Dokumen	6.000.000,00
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	3 Dokumen	38.000.000,00	PAD		3 Dokumen	38.000.000,00
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Provinsi Sumatera Barat	4 Dokumen	95.000.000,00	PAD		4 Dokumen	95.000.000,00
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Tertib Administrasi Keuangan Kegiatan Indikator Hasil : Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kelompok Sasaran : Administrasi Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		12 Bulan	7.895.000.000,00	PAD		12 Bulan	7.895.000.000,00
				12 Bulan				12 Bulan	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Provinsi Sumatera Barat	58 Orang	7.000.000.000,00	PAD		58 Orang	7.000.000.000,00
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Provinsi Sumatera Barat	28 Orang	830.000.000,00	PAD		28 Orang	830.000.000,00
1.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	18 Laporan	65.000.000,00	PAD		18 Laporan	65.000.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Tertib administrasi barang milik daerah		12 Bulan	140.000.000,00	PAD		12 Bulan	140.000.000,00
		Indikator Hasil : Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah		12 Bulan				12 Bulan	
		Kelompok Sasaran : Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
1.04.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	140.000.000,00	PAD		1 Dokumen	140.000.000,00
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas		60%	197.000.000,00	PAD		60%	197.000.000,00
		Indikator Hasil : Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya		60%				60%	
		Kelompok Sasaran : Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Provinsi Sumatera Barat	75 Stel	66.000.000,00	PAD		75 Stel	66.000.000,00
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Provinsi Sumatera Barat	7 Orang	63.000.000,00	PAD		7 Orang	63.000.000,00
1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Provinsi Sumatera Barat	6 Kali	68.000.000,00	PAD		6 Kali	68.000.000,00
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Tertib administrasi umum		60%	1.335.000.000,00	PAD		60%	1.335.000.000,00
		Indikator Hasil : Terselenggaranya administrasi umum perkantoran		12 Bulan				12 Bulan	
		Kelompok Sasaran : Administrasi Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	12.000.000,00	PAD		1 Paket	12.000.000,00
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	500.000.000,00	PAD		1 Paket	500.000.000,00
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	216.000.000,00	PAD		1 Paket	216.000.000,00
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	12 Jenis	93.000.000,00	PAD		12 Jenis	93.000.000,00
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	96 Eksemplar	14.000.000,00	PAD		96 Eksemplar	14.000.000,00
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	500.000.000,00	PAD		1 Dokumen	500.000.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Keluaran : Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Indikator Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Kegiatan Daerah Kelompok Sasaran : Jasa Penunjang Urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		60% 12 Bulan	626.400.000,00	PAD		60% 12 Bulan	626.400.000,00
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Provinsi Sumatera Barat	200 Surat	6.400.000,00	PAD		200 Surat	6.400.000,00
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Provinsi Sumatera Barat	11 Orang	620.000.000,00	PAD		11 Orang	620.000.000,00
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Keluaran : Tertib pemeliharaan barang milik daerah Indikator Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		60% 60% 12 Bulan	391.000.000,00	PAD		60% 60% 12 Bulan	391.000.000,00
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Provinsi Sumatera Barat	8 Unit 1 Unit	345.000.000,00	PAD PAD		8 Unit 1 Unit	345.000.000,00
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumatera Barat	55 Unit	46.000.000,00	PAD		55 Unit	46.000.000,00
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperihara/direhab	Provinsi Sumatera Barat	2 Unit	-	PAD		2 Unit	-
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program		1,0%	1.670.314.600,00	PAD		1,0%	1.683.350.000,00
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Indikator Keluaran : Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Hasil : Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat Kelompok Sasaran : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota		20% 3 Dokumen	1.475.000.000,00	PAD		20% 3 Dokumen	1.401.100.000,00
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	625.000.000,00	PAD		1 Dokumen	500.000.000,00
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersedianya data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 Dokumen	850.000.000,00	PAD		1 Dokumen	900.000.000,00
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersedianya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	-	PAD		1 Dokumen	1.100.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Indikator Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		20%	186.600.000,00	PAD		20%	195.000.000,00
		Indikator Hasil : Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan		20%				20%	
		Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan							
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Provinsi Sumatera Barat	50 orang	99.900.000,00	PAD		50 orang	100.000.000,00
1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Provinsi Sumatera Barat	50 orang	51.500.000,00	PAD		50 orang	55.000.000,00
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP kepada Pemerintah dan Asosiasi/Badan Usaha/Lembaga terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Provinsi Sumatera Barat	50 Orang	35.200.000,00	PAD		50 Orang	40.000.000,00
1.04.02.1.04	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Indikator Keluaran : Jumlah Rumah yang dibagikan kepada Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi		20%	8.714.600,00	PAD		20%	87.250.000,00
		Indikator Hasil : Terdistribusinya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Terkena relokasi Program Provinsi		20%				20%	
		Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah, Masyarakat Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi							
1.04.02.1.02.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi Yang Terehabilitasi	Kab Pasaman dan Kab Pasaman Barat	300 unit rumah	-	PAD		300 unit rumah	135.000.000,00
1.04.02.1.02.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Kab Pasaman dan Kab Pasaman Barat	100 Orang	8.714.600,00			100 Orang	87.250.000,00
1.04.02.1.02.03	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi Yang Terbangun	Kab Pasaman dan Kab Pasaman Barat	100 unit rumah	-	PAD		100 unit rumah	1.100.000,00
1.04.02.1.02.04	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Yang Terkena Relokasi Program Provinsi Yang Terbangun	Kab Pasaman dan Kab Pasaman Barat	100 unit rumah	-	PAD		100 unit rumah	1.100.000,00
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Indikator Keluaran : Jumlah Rumah yang dibagikan kepada Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi		20%	-	PAD			1.100.000,00
		Indikator Hasil : Terdistribusinya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Terkena relokasi Program Provinsi		20%					
		Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah, Masyarakat Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi							
1.04.02.1.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Kab Pasaman dan Kab Pasaman Barat	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	1.100.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani		8,00%	10.812.011.300,00	PAD		8,00%	4.100.000.000,00
1.04.02.104.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Indikator Keluaran : Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan Indikator Hasil : Penurunan Luas Kawasan Kumuh Kegiatan Kelompok Sasaran : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Laporan	830.715.000,00	PAD		1 Laporan	600.000.000,00
				12,66%				12,66%	
1.04.03.1.01.01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina		6 kelompok	-	PAD		6 kelompok	
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik		6 kali	-	PAD		6 kali	
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusunnya kebijakan dan legislasi untuk bidang perumahan		2 Dokumen	600.000.000,00	PAD		2 Dokumen	350.000.000,00
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terlaksana	19 Kabupaten/Kota	1 Laporan	230.715.000,00	PAD		1 Laporan	250.000.000,00
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Indikator Hasil : Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kelompok Sasaran : Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat Penerima Manfaat		180 ha	9.981.296.300,00	PAD		180 ha	3.500.000.000,00
				10%				10%	
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen Site Plan dan DED		19 Dokumen	220.560.000,00	PAD		2 Dokumen	
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni		1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani		100 Unit	3.322.000.000,00	PAD		50 Unit	3.500.000.000,00
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Kumuh Yang Ditangani		30 ha	6.438.736.300,00	PAD		10 Kawasan	-



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permukiman Yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)		20,00%	3.508.631.094,00	PAD		20,00%	7.308.461.550,00
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Kegiatan Permukiman Indikator Hasil : Tersedianya PSU yang menunjang Fungsi Kegiatan Permukiman Kelompok Sasaran : Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat Penerima Manfaat		180 ha 8,71%	3.508.631.094,00	PAD		180 ha 8,71%	7.308.461.550,00
1.04.04.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen Perencanaan / DED PSU Permukiman	57 Dokumen	149.026.500,00	PAD		57 Dokumen	7.308.461.550,00
1.04.04.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman	250 paket	3.198.379.750,00	PAD		250 paket	-
1.04.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU permukiman	1 Laporan	161.224.844,00	PAD		1 Laporan	-
1.04.04.1.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kerja sama Penyediaan /pengelolaan PSU Permukiman	1 Kawasan	-	PAD		1 Kawasan	-
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				625.990.650,00	PAD			502.000.000,00
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Luas Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang difasilitasi		80%	-	PAD		80%	-
2.10.02.1.01	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberian Rekomendasi / Fasilitasi Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi Indikator Hasil : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan usaha Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Laporan 100%	-	PAD		1 Laporan 100%	-
2.10.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	-



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan		85%	265.495.350,00	PAD		85%	192.000.000,00
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Indikator Keluaran : Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Kegiatan Indikator Hasil : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Kegiatan		1 Laporan	265.495.350,00	PAD		1 Laporan	192.000.000,00
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	265.495.350,00	PAD		1 Laporan	192.000.000,00
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal		70%	161.554.900,00	PAD		70%	82.000.000,00
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indikator Keluaran : Meningkatkan Kualitas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Garapan Indikator Hasil : Meningkatnya Kualitas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Garapan Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Kegiatan		1 Laporan	161.554.900,00	PAD		1 Laporan	82.000.000,00
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	91.927.300,00	PAD		1 Laporan	49.000.000,00
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	69.627.600,00	PAD		1 Laporan	33.000.000,00
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan		70%	81.537.150,00	PAD		70%	82.000.000,00
2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Hasil : Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Kegiatan		1 Laporan	81.537.150,00	PAD		1 Laporan	82.000.000,00
2.10.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	81.537.150,00	PAD		1 Laporan	82.000.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

2.10.06	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase luas penempatan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti		70%	74.999.900,00	PAD		70%	64.850.000,00
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indikator Keluaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Laporan	74.999.900,00	PAD		1 Laporan	32.000.000,00
2.10.06.1.01.01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	74.999.900,00	PAD		1 Laporan	32.000.000,00
2.10.06.1.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indikator Keluaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	32.850.000,00
2.10.06.1.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	32.850.000,00
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah		80%	42.403.350,00	PAD		80%	43.150.000,00
2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indikator Keluaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Laporan	42.403.350,00	PAD		1 Laporan	43.150.000,00
2.10.07.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	42.403.350,00	PAD		1 Laporan	43.150.000,00
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya		70%	-	PAD		70%	-
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Indikator Keluaran Kegiatan : Terlaksananya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Indikator Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas penyelesaian tanah kosong dalam 1(satu) daerah provinsi Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	-
2.10.08.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	-
2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Indikator Keluaran Kegiatan : Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Indikator Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas penyelesaian tanah kosong dalam 1(satu) daerah provinsi Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	-
2.10.08.1.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Laporan hasil Inventarisasi Tanah Kosong yang terlaksana	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	-
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan		55%	-	PAD		55%	38.000.000,00
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indikator Keluaran Kegiatan : Tersedianya rencana penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Indikator Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah kosong di Provinsi Sumatera Barat Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		1 Dokumen	-	PAD		1 Dokumen	38.000.000,00
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	38.000.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana. Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, program nasional dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian SDGs.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisolir.



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1																		
1	04									121,619,400,361								2,998,940,550,212
1	04	01								20,952,882,176								15,137,045,212
1	04	01	1.01							175,500,000								201,825,000
1	04	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, Renstra, Renja, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					115,000,000
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		75,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					86,825,000
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,754,755,806							10,067,969,177
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan dalam 1 Tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		8,174,395,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9,400,555,177
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengadaan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		495,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					569,664,000
1	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya akuntansi pelaporan keuangan OPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Laporan		85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					97,750,000
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						95,830,000							110,204,500
1	04	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkendalinya Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		95,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					110,204,500
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						214,553,500							246,736,525
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Stel		56,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					64,687,500



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang		81,467,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93,687,050	
1 04 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengikuti bimbingan teknis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang		76,836,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,361,975	
1 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,128,009,220				1,285,710,803	
1 04 01 1.05 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		11,948,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,740,200	
1 04 01 1.05 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		372,149,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			416,472,178	
1 04 01 1.05 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor dan makanan minuman untuk pertemuan yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		127,147,000				146,219,050	
1 04 01 1.05 05	Penyediaan Berang Cetak dan Penggandaan		Berang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,552,250	
1 04 01 1.05 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		12,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,383,000	
1 04 01 1.05 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		ka koma [] diganti titik [.] Indikator Keluaran Sub Kegiatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		466,807,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			536,828,625	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1 04 01 1.05 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jaringan Internet dan Aplikasi Zoom Meeting yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		86,622,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,615,300	
1 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							535,431,000				2,385,745,650	
1 04 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/operasional yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		335,431,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		385,745,650	
1 04 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Mebel Rumah Dinas Jabatan yang diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,000,000,000	
1 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							390,068,050				448,578,257	
1 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Sizat Menyurat		Jumlah Sizat yang Didistribusikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kali		5,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,555,000	
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Sopir Kantor dan Pramutamu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		384,368,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		442,023,257	
1 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9,658,734,600				390,275,500	
1 04 01 1.09 02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit		304,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		345,253,000	
1 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan Gedung Kantor yang di pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		39,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45,022,500	
1 04 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Berat Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		9,315,164,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							3,957,818,185				1,151,973,500,000	
1 04 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							3,500,000,000				1,151,450,000,000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1 04 02 1.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi								1,500,000,000				750,000,000
1 04 02 1.01 02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								1,000,000,000				700,000,000
1 04 02 1.01 05	Pendataan Rumah Sewe Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								1,000,000,000				1,150,000,000,000
1 04 02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								457,818,185				523,500,000
1 04 02 1.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								137,818,185				158,500,000
1 04 02 1.02 02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan								120,000,000				135,000,000
1 04 02 1.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP								200,000,000				230,000,000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								57,050,000,000				1,786,332,500,000
1 04 03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								2,700,000,000				1,726,380,000,000
1 04 03 1.01 01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN															
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.03.1.01.02	Penyediaan Publik Pencagahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Kelompok Masyarakat Sedar Permukiman		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Pokmas		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			690,000,000	
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							1,500,000,000					1,725,000,000	
1.04.03.1.02	Peringkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							54,350,000,000					59,952,500,000	
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Dokumen DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,380,000,000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman kembali dan Rumah Tidak Layak Huni		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				172,500,000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 unit		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,300,000,000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman/ Perumahan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Padang Pariaman, Likiep, Tapakih, Semua Kelurahan, Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kawasan		51,000,000,000	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)		56,100,000,000		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												39,658,700,000	45,497,505,000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					39,658,700,000			45,497,505,000		
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen Perencanaan PSU		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57 Dokumen		2,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,420,000,000
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan US&as Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terbangunnya PSU		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250 paket		36,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42,320,000,000
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan US&as Umum Permukiman	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU permukiman		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		158,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		182,505,000
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kerja sama Penyediaan /pengelolaan PSU Permukiman		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kawasan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		575,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1,920,397,338			3,760,794,676		
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					115,326,600			230,653,200		
2	10	02	1.01		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					115,326,600			230,653,200		
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Usaha		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		115,326,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		230,653,200
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					416,006,922			832,013,844		
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					416,006,922			832,013,844		
2	10	03	1.01	01	Pembertahaan, Pendataan Asal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		416,006,922	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		832,013,844
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					270,000,000			540,000,000		
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					270,000,000			540,000,000		
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Kualitas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Garapan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Target
2 10 04 1.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Meningkatkan Kualitas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Garapan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			240,000,000
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							178,604,948					357,209,896
2 10 05 1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							178,604,948					357,209,896
2 10 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		178,604,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			357,209,896
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							350,000,000					700,000,000
2 10 06 1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							200,000,000					400,000,000
2 10 06 1.01 01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah		Meningkatkan Kualitas Pemetaan Akses dalam Pemanfaatan Tanah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000
2 10 06 1.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							150,000,000					300,000,000
2 10 06 1.02 01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT							159,082,548					318,165,096
2 10 07 1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							159,082,548					318,165,096
2 10 07 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terwujudnya Kepastian Hukum Pengusahaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		159,082,548	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			318,165,096
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							316,376,320					632,752,640
2 10 08 1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong							116,376,320					232,752,640
2 10 08 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		116,376,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			232,752,640
2 10 08 1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							200,000,000					400,000,000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.10.08.1.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Kosong		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							115,000,000					150,000,000	
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							115,000,000					150,000,000	
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Meningkatnya Kesesuaian dan Ketersediaan Penatagunaan Tanah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
TOTAL									123,539,797,899				3,002,701,344,888	





BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.